



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.69 JAKARTA 12190
TELEPON (021)7398381-7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS <https://www.menpan.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Program Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Reublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Pemrakarsa menginformasikan perkembangan penyusunan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap triwulan kepada Sekretariat Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.

KEEMPAT : Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum melakukan verifikasi atas perkembangan realisasi Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga untuk selanjutnya dilaporkan Kepada Menteri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



RENI SUZANA

Tembusan:

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan;
2. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
5. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan;
6. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
8. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi
9. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
10. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan
11. Inspektur Kementerian.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI TAHUN 2025

DAFTAR PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
Kedepatian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan						
1	Peraturan Menteri tentang Road Map Reformasi Birokrasi (2025-2030)	sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	1. Terkait dengan R Perpres Grand Design RB; 2. Sedang menunggu Perpres Grand Design RB yang Izin Prakarsanya belum diterbitkan

			Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029			
2	Peraturan Menteri tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi RB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat arahan Pimpinan, penyusunan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025. 2. Akan dievaluasi apakah rancangan akan dikeluarkan dari matriks
3	Peraturan Menteri tentang Pencabutan Permen PANRB No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L dan Pemerintah	Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 	1. Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Pencabutan/Perubahan Peraturan Menteri 2. Materi muatan sudah tidak relevan 3. Akan dibahas lebih lanjut, apakah memungkinkan

	Daerah		<p>2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029</p>			<p>untuk mencabut 8 Permen melalui 1 Peraturan</p>
4	Peraturan Menteri tentang Pencabutan Permen PANRB No. 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB saat ini	<p>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah</p>	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<p>1. Terkait Pencabutan/Perubahan Peraturan Menteri;</p> <p>2. Materi muatan sudah tidak relevan;</p> <p>3. Akan dibahas lebih lanjut, apakah memungkinkan untuk mencabut 8 Permen melalui 1 Peraturan</p>

			Nasional Tahun 2025-2029			
5	Peraturan Menteri tentang Pencabutan Permen PANRB No. 9 Tahun 2011 tentang Penyusunan Road Map Birokrasi K/L dan Pemerintah Daerah	Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Pencabutan/Perubahan Peraturan Menteri 2. Materi muatan sudah tidak relevan 3. Akan dibahas lebih lanjut, apakah memungkinkan untuk mencabut 8 Permen melalui 1 Peraturan
6	Peraturan Menteri tentang Pencabutan/Perubahan Permen PANRB No. 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Quick Wins	Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian 	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Pencabutan/Perubahan Peraturan Menteri; 2. Materi muatan sudah tidak relevan.

			<p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029</p>			
7	<p>Peraturan Menteri tentang Pencabutan Permen PANRB No. 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan</p>	<p>Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB saat ini</p>	<p>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029</p>	<p>Seluruh Instansi K/L/D</p>	<p>Usulan Baru</p>	<p>1. Terkait Pencabutan/Perubahan Peraturan Menteri</p> <p>2. Materi muatan sudah tidak relevan</p> <p>3. Akan dibahas lebih lanjut, apakah memungkinkan untuk mencabut 8 Permen melalui 1 Peraturan</p>

8	Peraturan Menteri tentang Pencabutan Permen PANRB No. 12 Tahun 2011 tentang Penataan Tata Laksana	Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 4. Terkait Pencabutan/Perubahan Peraturan Menteri; 5. Materi muatan sudah tidak relevan; 6. Akan dibahas lebih lanjut, apakah memungkinkan untuk mencabut 8 Permen melalui 1 Peraturan.
9	Peraturan Menteri tentang Pencabutan Permen PANRB No. 13 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi	Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait Pencabutan/Perubahan Peraturan Menteri; 2. Materi muatan sudah tidak relevan; 3. Akan dibahas lebih lanjut, apakah memungkinkan untuk mencabut 8 Permen melalui 1 Peraturan.

			<p>dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029</p>			
10	Peraturan Menteri tentang Pencabutan Permen PANRB No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Manajemen)	Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB saat ini	<p>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029</p>	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<p>1. Terkait Pencabutan/Perubahan Peraturan Menteri;</p> <p>2. Materi muatan sudah tidak relevan;</p> <p>3. Akan dibahas lebih lanjut, apakah memungkinkan untuk mencabut 8 Permen melalui 1 Peraturan.</p>
11	Peraturan Menteri tentang Pencabutan	Sudah tidak relevan dengan kebijakan RB	<p>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang</p>	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan Baru	<p>1. Terkait Pencabutan/Perubaha</p>

	Permen PANRB No. 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi K/L	saat ini	<p>Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;</p> <p>3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.</p>			<p>n Peraturan Menteri</p> <p>2. Sudah ada Permen PANRB No. 8 Tahun 2024 yang memperbaharui peraturan ini</p>
--	---	----------	---	--	--	---

Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

1	Peraturan Menteri PANRB tentang Pola Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah	<p>pengaturan dalam rangka percepatan implementasi paradigma baru (flexible working arrangement) yg fokus pada, fleksibilitas kerja</p> <p>waktu, tempat jumlah</p>	PP 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil	<p>1. LAN</p> <p>2. BKN</p>	Lungsuran 2023 dan 2024	<p>1. Sudah dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>2. Belum dilakukan penetapan karena terdapat hal yang akan dilakukan penyesuaian</p> <p>3. Masih dalam tahap</p>
---	---	---	--	-----------------------------	-------------------------	--

		pekerjaan, pemanfaatan teknologi penunjang, dan aplikasi pendukung melalui cloud storage				penetapan
2	Peraturan Menteri PANRB tentang Indeks Kelembagaan	Instrumen evaluasi Kelembagaan dengan hasil indeks	Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi kelembagaan	Seluruh Instansi K/L	Lungsuran 2023 dan 2024	Hasil Monev 2024: 1. Telah terdapat draft 2. Akan dilakukan uji coba ke instansi pemerintah
3	Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Manajemen Proses Bisnis pada Instansi Pemerintah	Disusun untuk mengintegrasikan Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 dan Permen PANRB No. 19 Tahun 2018	1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi 2. Peraturan Menteri PANRB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah	Seluruh Instansi K/L/D	Lungsuran 2024	Hasil Monev 2024: 1. Masih tahap penyusunan 2. Penyusunan draft dan pembahasan dengan instansi lain 3. Pembahasan sudah dilakukan antar asdep 4. Tahun 2025 di kembangkan konsep levelling probis
Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur						
1	Peraturan Menteri PANRB tentang Sistem Merit dan		1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil	1. Kementerian PANRB 2. Badan Kepegawaian	Usulan Baru	1. Telah dilakukan pembahasan secara internal Kedeputian SDM Aparatur terkait

	Manajemen Talenta		Negara	Negara 3. Lembaga Administrasi Negara 4. Kementerian Hukum 5. Kementerian Sekretariat Negara		kebijakan Sistem Merit dan Manajemen Talenta; 2. Telah berkoordinasi dengan Pak Herman BKN dengan membahas kerangka sistem merit dalam pembangunan nasional 3. BKN akan membentuk indeks sistem merit 4. dalam rangka mengantisipasi jika rpp masn nya terbit 5. masuk kedalm PK Pak deputy SDMA
2	Peraturan Menteri tentang JF Pengawas Keselamatan Pelayaran	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara	Lungsuran 2024	1. Telah dilakukan harmonisasi 2. Telah dilakukan harmonisasi dan mendapat surat selesai harmonisasi dari Kementerian Hukum

		<p>tahun 2023.</p> <p>Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.</p> <p>Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>				
3	Peraturan Menteri tentang JF Analisis HAM	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	Lungsuran 2024	sudah dilakukan harmonisasi

		<p>PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>	Jabatan Fungsional			
4	Peraturan Menteri tentang JF Bidang Keolahragaan	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	Lungsuran 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah diajukan permohonan harmonisasi

		<p>sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>	<p>2023 tentang Jabatan Fungsional</p>			
5	Peraturan Menteri tentang JF Bidang Karantina	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	<p>Lungsuran 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang dalam proses penelaahan (pembahasan ruang lingkup)

		<p>dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p>			
6	Peraturan Menteri tentang JF Pengawas Jaminan Produk Halal	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	<p>Lungsuran 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Kebijakan sudah finalisasi. Akan diusulkan pengajuan harmonisasi

		<p>existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>	<p>3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p>			
7	<p>Peraturan Menteri tentang JF Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga</p>	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang</p>	<p>1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat</p>	<p>Lungsuran 2024</p>	<p>1. Sedang dalam proses penelaahan.</p>

		<p>Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>	<p>Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p>	<p>Negara</p>		
8	<p>Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2024 tentang JF Bidang Pertanian</p>		<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11</p>	<p>1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat</p>	<p>Usulan baru</p>	<p>Tahap penyusunan</p>

			<p>Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</p> <p>3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p>	Negara		
9	Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</p> <p>7. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p>	<p>1. Kementerian PANRB</p> <p>2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul</p> <p>3. Kementerian Hukum</p> <p>4. Kementerian Sekretariat Negara</p>	Lungsuran 2024	<p>1. Akan dilakukan rapat finalisasi rancangan dan validasi hasil uji beban kerja</p>

		Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.				
10	Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	Lungsuran 2024	Proses penelaahan

		nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.				
11	Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ketenagakerjaan	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	Usulan Baru	Sedang dalam proses penelaahan (Pembahasan ruang lingkup)

		<p>tujuan pembangunan nasional.</p> <p>Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>				
12	Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023.</p> <p>Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	Usulan Baru	Sedang dalam proses penelaahan (Pembahasan ruang lingkup)

		<p>rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.</p> <p>Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>				
13	Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Arsiparis	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	Usulan Baru	Dalam proses penelaahan

		<p>fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.</p> <p>Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>				
14	Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Agraria dan Tata Ruang	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023.</p> <p>Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	Usulan baru	Dalam proses penelaahan

		<p>kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.</p> <p>Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>				
15	Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertahanan	<p>Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PANRB 2. Instansi Pembina/Instansi Pengusul 3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Sekretariat Negara 	Usulan baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draft kebijakan sudah finalisasi 2. Akan diusulkan pengajuan harmonisasi

		<p>mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.</p> <p>Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Kedeputan Bidang Pelayanan Publik

1	Peraturan Menteri tentang Peta Jalan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2025 – 2029	<p>(Revisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kerangka kebijakan pengelolaan pengaduan dalam menghadapi dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks. Revisi regulasi ini memiliki beberapa tujuan strategis yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 3. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 4. Perpres Nomor 47 tahun 2021 5. PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 6. PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2021 	Seluruh instansi pemerintahan dan BUMN yang terhubung pada SP4N-LAPOR!	Usulan baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan nota dinas Asdep Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat No. 3/PP.03/2025 tanggal 7 januari 2025 tentang Rencana Penetapan Permen Peta Jalan SP4N 2025-2029
---	---	---	--	--	-------------	--

		saling terkait dan mendukung satu sama lain.				
2	Peraturan Menteri PANRB tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Perubahan Peraturan Menteri No. 92 Tahun 2021)	Proses atau tahapan pengusulan pembentukan MPP yang diatur di dalam PermenPANRB 92/2021 belum dapat mengakomodir kebijakan percepatan pembentukan MPP di setiap kabupaten/kota untuk itu perlu disempurnakan sebagaimana Perpres 89/2021 yang akan diperbaiki. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pengelolaan (operasional) MPP agar dapat memberikan kepastian hukum dan petunjuk bagi penyelenggara dalam mengelola MPP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Perpres 132 Tahun 2022; 5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Investasi/BKPM 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika. 	Lungsuran 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lungsuran 2. Masih tahap Perencanaan 3. Masih penyusunan kajian/naskah urgensi dengan melibatkan akademisi 4. Masih pembahasan internal dan penyesuaian dengan substansi renstra 2025 (renstra masih kajian) 5. Perlu dilakukan kajian oleh karena materi muatan akan dimasukkan pada perubahan perpres mpp (perpres 89/2021)

3	<p>Peraturan Menteri PANRB tentang Perubahan Permen No. 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional</p>	<p>Tujuan dari perubahan peraturan ini adalah untuk menguatkan pengelolaan pengaduan dari sisi kelembagaan, pengelolaan, penghargaan dan sanksi, serta penyediaan aplikasi. Berdasarkan pada hasil inventarisasi masalah yang telah dilakukan, ditemukan beberapa urgensi peraturan menteri tersebut perlu dilakukan perubahan yaitu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! yang belum optimal yang disebabkan oleh kecepatan dan kualitas penyelesaian aduan yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil dari Survei Kepuasan kepada masyarakat dan pengelola yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 3. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 4. Perpres Nomor 47 tahun 2021 5. PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 6. PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2021 	<p>Seluruh instansi pemerintahan dan BUMN yang terhubung pada SP4N-LAPOR!</p>	<p>Lungsuran 2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Harmonisasi Tahun 2024 2. Monev TW IV 3. Sudah selesai harmonisasi tapi blm ada tindak lanjut untuk penetapan 4. proses penetapan dan menunggu paraf koordinasi
---	--	--	--	---	-----------------------	---

dilakukan pada tahun 2022, menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2020;

2. Pemanfaatan kanal aduan SP4N-LAPOR! yang belum optimal. Berdasarkan data jumlah pengaduan yang meningkat namun masih relatif rendah, mengingat pada Roadmap SP4N Tahun 2020-2024 ditargetkan untuk menerima laporan sebanyak 1.8 juta;
3. Pemanfaatan data laporan dari SP4N-LAPOR! untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan publik masih kurang; serta
4. Berkembangnya kompleksitas penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada pengelolaan pengaduan dengan berdasarkan pada

		data jumlah instansi yang terhubung dengan SP4N-LAPOR! saat ini meningkat secara signifikan serta adanya perubahan arah kebijakan pada skala nasional yang menuntut adanya perubahan tata kelembagaan dalam pengelolaan pengaduan.				
4	Permenpanrb tentang Pencabutan R permenpan No. 32/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Kompetisi Antar Kota adya/Kabupaten administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Sudah tidak digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Usulan baru	Berdasarkan Nota dinas Kepala Biro SDMOH kepada Sesdep Pelayanan Publik Nomor 12/HK.01/2025 perihal Penyampaian Analisis Permenpanrb tanggal 8 Januari 2025

			<p>2022 tentang Ibu Kota Negara</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>			
5	<p>Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/26/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara</p>	<p>Sudah tidak digunakan lagi</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>3. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	-	<p>Usulan baru</p>	<p>Berdasarkan nota dinas nomor 50/PP.99/2025 tentang Penyampaian usulan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025</p>

	<p>Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/26/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota</p>					
6	<p>Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	<p>sudah tidak digunakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 	-	<p>Usulan baru</p>	<p>Berdasarkan nota dinas nomor 50/PP.99/2025 tentang Penyampaian usulan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025</p>

7	Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016	sudah tidak relevan atau sudah tidak digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 3. PermenPANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik 	-	Usulan baru	Berdasarkan nota dinas nomor 50/PP.99/2025 tentang Penyampaian usulan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025
8	Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017	sudah tidak relevan atau sudah tidak digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 3. PermenPANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik 	-	Usulan baru	Berdasarkan nota dinas nomor 50/PP.99/2025 tentang Penyampaian usulan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025

9	Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018.	sudah tidak relevan atau sudah tidak digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 3. PermenPANRB Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik 	-	Usulan baru	Berdasarkan nota dinas nomor 50/PP.99/2025 tentang Penyampaian usulan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025
10	Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Melayani Tahun 2018-2019	sudah tidak relevan atau sudah tidak digunakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 	-	Usulan baru	Berdasarkan nota dinas nomor 50/PP.99/2025 tentang Penyampaian usulan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dilakukan Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2025 tanggal 4 Februari 2025

11	Pencabutan / Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024	Revisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kerangka kebijakan pengelolaan pengaduan dalam menghadapi dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks. Revisi regulasi ini memiliki beberapa tujuan strategis yang saling terkait dan mendukung satu sama lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 3. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Permen PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 	-	Usulan baru	Perencanaan
----	--	--	--	---	-------------	-------------

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

1.	Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan	setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 3. Peraturan Menteri 		Lungsuran Tahun 2024	Pembahasan
----	---	--	--	--	----------------------	------------

	Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	pimpinan penyelenggara pelayanan publik, terdapat perubahan dalam susunan standar pelayanan yang ada di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari yang sebelumnya ditetapkan sehingga perlu mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
Biro Umum dan Keuangan						
1	Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan	Adanya perubahan SOTK pada Kementerian PANRB yang dimana	1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Kementerian Keuangan	Lungsuran Tahun 2024	Sedang disusun Pedoman tentang Pelaksanaan APBN di Lingkungan Kementerian

	Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	peraturan tersebut sudah tidak relevan serta banyak materi didalamnya sudah tidak sesuai dengan peraturan baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan maupun lainnya dan ada beberapa poin didalamnya yang diperlukan perbaikan dalam optimalisasi pengelolaan keuangan	2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara			PANRB, untuk kemudian akan diajukan permohonan pencabutan Peraturan Menteri dimaksud.
2	Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Permenpan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah tidak relevan serta diperlukan upaya optimalisasi layanan keprotokolan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan acara di lingkungan	1. UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan	Kementerian PANRB	Usulan baru	perencanaan

		Kementerian PANRB				
Manajemen Kinerja dan Kerja Sama						
1	Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029	Diterbitkannya PerPres 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sehingga perlu penjabaran lebih lanjut terkait sasaran, indikator kinerja dan target kinerja KemenPANRB untuk tahun 2025-2029	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L Tahun 2025-2029	Kementerian PPN/Bappenas	Usulan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditargetkan akan diselesaikan pada TW III atau IV dengan mengikuti perpanjangan <i>deadline</i> Penyusunan PerMen dari Bappenas karena Inpres 1/2025) 2. muatan indikator akan disesuaikan kembali mengikuti PerPres 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang baru disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2025
SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

RENI SUZANA